

BAB 2

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Agenda pada sejumlah fora kerja sama internasional pada 2021 secara umum difokuskan pada upaya untuk memperkuat komitmen mengatasi dampak pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi global. Diskusi pada fora kerja sama internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral diarahkan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan pada perekonomian global, terutama yang disebabkan oleh pandemi, serta merumuskan respons kebijakan yang tepat. Selain itu, agenda untuk mengatasi sejumlah permasalahan jangka panjang, seperti produktivitas, *sustainable finance*, dan pertumbuhan inklusif, juga terus dilanjutkan. Sejumlah inisiatif telah digulirkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dari krisis yang disebabkan pandemi COVID-19. IMF memiliki inisiatif untuk mengurangi utang negara miskin, dan menambah cadangan devisa global dengan memberikan alokasi *Special Drawing Rights* (SDR) kepada negara anggota. Forum G20 juga terus berkomitmen melakukan kerja sama internasional melalui prinsip-prinsip yang mengacu pada *G20 Action Plan* untuk pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Sebagai Presidensi G20 pada 2022, Indonesia akan menjalankan peran strategis. Melalui tema "*Recover Together, Recover Stronger*" Presidensi G20 Indonesia akan fokus pada upaya mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Sebagai Presidensi G20, Indonesia tidak hanya berperan penting dalam mendukung perekonomian global keluar dari krisis akibat pandemi dan tumbuh secara lebih berkesinambungan, namun juga memberi manfaat nyata bagi pemulihan ekonomi nasional.

11.1.1. Kerja Sama untuk Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi

Penyebaran kasus infeksi COVID-19 yang berdampak luas terhadap perekonomian global mendorong fora kerja sama internasional berupaya mencari solusi untuk mengatasinya dan mendukung pemulihan ekonomi. Diskusi pada fora kerja sama internasional diarahkan pada upaya mengatasi berbagai masalah pada perekonomian global, dan merumuskan respons kebijakan yang tepat. Forum Bank for International Settlements (BIS), selain membahas perkembangan ekonomi global terkini, juga menyoroti berbagai isu yang berkembang dan merumuskan respons kebijakan mengatasi dampak pandemi.¹ Isu yang mengemuka dalam pembahasan antara lain dampak pandemi terhadap konsumsi rumah tangga, prospek jangka pendek ekonomi global di tengah pandemi dan ketidakpastian, evaluasi interaksi kebijakan moneter dan fiskal, serta *spillover* dari pemulihan ekonomi global yang tidak merata.

Sejalan dengan rencana normalisasi kebijakan moneter oleh negara maju, forum BIS membahas elemen kunci untuk menyukseskan kebijakan normalisasi. Elemen kunci yang didiskusikan adalah: (a) pencapaian tujuan makroekonomi yang konsisten dengan mandat bank sentral; dan (b) perlunya bank sentral membangun kembali ruang yang cukup untuk bermanuver dalam mengantisipasi pelemahan ekonomi pada masa depan atau kejadian tak terduga. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah divergensi pemulihan ekonomi antarnegara menyebabkan waktu dan kecepatan normalisasi kebijakan setiap negara yang juga berbeda.

Gubernur Bank Sentral anggota BIS mendiskusikan kemungkinan pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Dalam pembahasan “*COVID and Beyond*” dikemukakan bahwa resesi global yang sangat dalam akibat pandemi diperkirakan berakhir lebih cepat ditopang oleh

dukungan kebijakan akomodatif. Stimulus fiskal yang besar dan penarikan akumulasi tabungan rumah tangga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan disertai peningkatan inflasi. Namun demikian, penyebaran virus yang tidak terkendali berpotensi menghambat pemulihan ekonomi. Dalam jangka pendek, pemulihan ekonomi global yang tidak merata dapat menimbulkan tantangan kebijakan bagi negara berkembang. Oleh sebab itu, otoritas perlu meletakkan fundamental ekonomi yang kuat sebagai prasyarat melakukan normalisasi kebijakan, serta mengelola potensi risiko *spillover*.

Perbedaan besaran stimulus kebijakan dan vaksinasi menyebabkan divergensi pemulihan ekonomi antarnegara yang berimplikasi pada perbedaan respons kebijakan. Isu tersebut dibahas pada Forum Executives' Meeting of Asia-Pacific Central Banks (EMEAP) pada Agustus 2021. Sejumlah tantangan juga mewarnai pergerakan ekonomi dunia antara lain tekanan inflasi di kawasan sebagai dampak dari kebijakan mengatasi pandemi, bagaimana mengomunikasikan kebijakan untuk mengatasi pandemi, dan *exit strategy*. Komunikasi merupakan bagian dari *policy tools* yang berperan penting dalam mendukung bauran kebijakan, terutama untuk mengelola ekspektasi, mengurangi ketidakpastian, dan menjaga kredibilitas. Dari sisi perbankan, sejauh ini kinerja sektor perbankan negara EMEAP pada era pandemi masih resilien, namun cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit.² Kondisi ekonomi yang belum pulih danantisipasi akan semakin terbatasnya dukungan kebijakan melatarbelakangi kehati-hatian perbankan tersebut.

ASEAN juga berkomitmen untuk bersama-sama meningkatkan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di kawasan. Komitmen tersebut dilakukan melalui dukungan

¹ Berbagai topik tersebut didiskusikan pada *BIS Bimonthly Meeting* selama 2021.

² Didiskusikan pada pertemuan Gubernur Bank Sentral dan *Head of Supervisory* Juli 2021.

digitalisasi dan pendekatan yang berkelanjutan. Hal tersebut mengemuka dalam Pertemuan Tahunan ke-7 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada 30 Maret 2021. Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN 2021 mengusung tema “*We Care, We Prepare, We Prosper*”, dengan tiga strategi utama yaitu “*Recovery, Digitalisation, and Sustainability*”. Berdasarkan strategi utama tersebut, Brunei Darussalam menetapkan prioritas jalur keuangan ASEAN sebagai berikut:

1. *Recovery* melalui penandatanganan 9th ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Protocol on Financial Services,
2. *Digitalisation* melalui penyelenggaraan ASEAN Financial Literacy Conferences,
3. *Sustainability* melalui penyusunan ASEAN Taxonomy on Sustainable finance.

Kebijakan yang tepat dan segera merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatasi dampak pandemi. Agenda Kebijakan (*Global Policy Agenda/GPA*) Pertemuan Tahunan IMF-World Bank (IMF-WB) *Annual Meetings 2021* menekankan urgensi kebijakan untuk mengatasi dan membatasi dampak pandemi (*scarring effect*), serta mendukung transformasi ekonomi global. Urgensi dari respons kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh divergensi antar perekonomian akibat perbedaan akses terhadap vaksin dan ruang kebijakan. Selain itu, aspek lain yang dinilai kritis adalah bagaimana upaya untuk menjawab tantangan perekonomian jangka panjang yang disebabkan oleh isu perubahan iklim dan reformasi digital.

GPA 2021 mengangkat tema ‘Vaccinate, Calibrate, Accelerate’ sebagai prioritas kebijakan. Melalui tema **Vaccinate**, IMF mendorong kerja sama global untuk mempercepat vaksinasi yang sangat penting untuk menghentikan penyebaran pandemi, serta mengurangi divergensi ekonomi dan kesehatan. Dengan tema **Calibrate**, IMF menekankan bahwa kebijakan harus disesuaikan dengan perkembangan pandemi, ketersediaan *policy space* untuk mendukung pemulihan, dan upaya membatasi *scarring effect*. Bauran kebijakan pada level domestik perlu mempertimbangkan perkembangan pandemi dan ekonomi masing-masing negara, dengan tetap menjaga kredibilitas kerangka kebijakan fiskal dan

moneter, serta melakukan komunikasi kebijakan yang transparan. Dengan tema **Accelerate**, IMF mendukung transformasi ekonomi global untuk mencapai pemulihan yang inklusif, lebih hijau, dan berbasis digital.

Untuk mengatasi dampak krisis, IMF memiliki inisiatif untuk membantu negara-negara miskin yang terilit utang melalui program pengurangan utang. Dukungan IMF diberikan melalui *concessional loans* dan program pengurangan utang pada negara anggota yang miskin. Pemberian *concessional loans* untuk negara berpendapatan rendah (*Low Income Countries/LICs*) oleh IMF dilakukan melalui *Poverty Reduction Growth Trust* (PRGT).³ Sementara itu, pemberian pengurangan utang dilakukan melalui dua inisiatif yaitu *Heavily Indebted Poor Countries* (HIPC) dan *Catastrophe Containment and Relief Trust* (CCRT).⁴

IMF juga menempuh kebijakan untuk menambah alokasi *Special Drawing Right* (SDR) untuk meningkatkan likuiditas global dalam upaya mengatasi dampak pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi. Penambahan alokasi SDR adalah USD650 miliar atau sekitar SDR456 miliar pada Agustus 2021. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat cadangan devisa global dalam jangka panjang, memperbaiki kepercayaan pelaku ekonomi, serta mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Alokasi SDR terbesar sepanjang historis ini didistribusikan kepada seluruh negara anggota secara proporsional sesuai kuota masing-masing negara. Atas alokasi tersebut, Indonesia menerima tambahan SDR sebesar SDR4,46 miliar atau setara dengan USD6,31 miliar yang digunakan untuk menambah cadangan devisa negara.

3 PRGT bertujuan membantu negara miskin mencapai dan mempertahankan posisi makroekonomi yang stabil dan berkelanjutan sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan.

4 HIPC ditujukan sebagai pengurangan utang negara miskin yang terilit utang sehingga dapat mencapai posisi utang luar negeri yang *sustainable*. Program CCRT memiliki dua cakupan, yakni: (1) *Catastrophe Containment* untuk membantu penanganan bencana di area kesehatan, dan (2) *Post-Catastrophe Relief* untuk membantu penanganan bencana alam yang besar. Terdapat 29 negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan fasilitas CCRT dan sebagian besar adalah negara di kawasan Sub Sahara Afrika.

Alokasi SDR oleh IMF memberi tambahan cadangan devisa bagi negara anggota, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang domestik atau eksternal yang lebih mahal.⁵ IMF mendorong penyaluran SDR secara sukarela dari negara yang memiliki cadangan devisa dalam jumlah yang besar, untuk disalurkan kepada negara rentan dan miskin yang memerlukan.

Forum kerja sama G20 terus berkomitmen melakukan kerja sama internasional melalui prinsip-prinsip yang mengacu pada *G20 Action Plan* dengan tujuan pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam forum Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, turut serta mengesahkan *G20 Action Plan* dan berkomitmen mendukung proses pemulihan.⁶ Sesuai dengan perkembangan pandemi dan perekonomian global, *G20 Action Plan* diperbaharui di bawah Presidensi G20 Italia pada April 2021. Pembaharuan menyertakan serangkaian komitmen untuk terus mendukung respons kebijakan G20 terhadap pandemi dan mengarahkan koordinasi ekonomi internasional menuju pemulihan, serta mempersiapkan dunia pascapandemi COVID-19. Perkembangan dari *G20 Action Plan* di bawah Presidensi G20 Italia adalah sebagai berikut:

1. Pilar 1: *Health as a Global Common*. Anggota G20 terus mendukung upaya kolektif untuk memastikan bahwa respons kesehatan terhadap COVID-19 dan variannya akan efektif, cepat, dan adil. Per 30 September 2021, G20 telah berkomitmen sebesar USD14,5 miliar untuk *Access to COVID-19 Tools Accelerator* (ACT-A) dan berjanji untuk membagikan 1,2 miliar dosis vaksin melalui ACT-A. Selain itu, FMCBG G20 mengapresiasi pembentukan *Multilateral Leaders Task Force* (MLT) tentang Vaksin, Terapi, dan Diagnostik COVID-19

5 SDR merupakan cadangan devisa internasional (*international reserve assets*) yang diciptakan IMF sejak 1969 dan berfungsi sebagai tambahan cadangan devisa negara anggota.

6 *G20 Action Plan*, pertama kali disahkan pada April 2020 oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, menetapkan prinsip-prinsip utama yang menjadi acuan bagi komitmen G20 terhadap langkah spesifik untuk mendorong kerja sama ekonomi internasional dalam penanganan krisis dengan tujuan pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif.

untuk negara berkembang. Selain itu, G20 juga fokus pada perspektif jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan ketahanan sektor kesehatan terhadap guncangan di masa depan. Hal ini ditegaskan melalui "Deklarasi Roma" yang diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kesehatan Global, 21 Mei 2021.

2. Pilar 2: *Supporting and Shaping the Recovery*.

G20 memantau perkembangan krisis dengan memperhatikan ruang fiskal, stabilitas harga dan keuangan, produktivitas dan ketenagakerjaan, serta potensi digitalisasi. Dari sisi perpajakan, G20 telah mencapai kesepakatan bersejarah tentang agenda reformasi perpajakan internasional, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi digital. Kesepakatan tersebut dilakukan melalui penerapan dua pilar perpajakan, yaitu realokasi keuntungan perusahaan multinasional untuk negara pasar (*market countries*), dan penerapan tingkat pajak minimum untuk menghindari perang tarif pajak (*race to the bottom*). Kesepakatan ini diharapkan dapat membentuk sistem perpajakan internasional yang lebih stabil dan adil.

3. Pilar 3: *Supporting Vulnerable Economies*.

G20 menyambut baik dukungan terhadap negara-negara yang mengalami kerentanan ekonomi akibat pandemi. G20 sepakat menyalurkan *Special Drawing Rights* secara sukarela oleh negara-negara yang memiliki posisi eksternal kuat untuk membantu negara-negara yang rentan. Opsi penyaluran yang dipersiapkan yaitu: (a) peningkatan kapasitas *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT) guna pendanaan bagi negara-negara miskin, (b) pembentukan fasilitas pendanaan baru berupa *Resilience and Sustainability Trust* (RST) untuk membantu negara yang menghadapi risiko stabilitas *balance of payments* dan kebutuhan pembiayaan agenda reformasi ekonomi (a.l. penguatan sistem kesehatan, pembiayaan transisi perubahan iklim, dan mengatasi dampak dari digitalisasi), dan (c) penyaluran melalui *Multilateral Development Banks* (MDBs) guna mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). G20 juga telah menyepakati perpanjangan *Debt Service Suspension Initiative* (DSSI) untuk

negara-negara termiskin hingga 31 Desember 2021, yang juga telah disepakati *Paris Club*, serta melaksanakan perbaikan pengelolaan utang luar negeri melalui implementasi *Common Framework to Support Debt Sustainability*. Selain itu, G20 berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas program kerja dengan memperkuat elemen struktural lain dalam arsitektur keuangan internasional.

4. Pilar 4: Protecting The Planet. Selama 2021, pembiayaan berkelanjutan (*sustainable finance*) dan ekonomi hijau telah menjadi topik utama diskusi pada jalur keuangan G20 (*finance track*). Pada awal Presidensi G20 Italia, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 sepakat mengaktifkan kembali Kelompok Studi Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Study Group / SFSG*). Kemudian, pada April 2021 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 sepakat untuk meningkatkan SFSG menjadi salah satu Kelompok Kerja (*working group*) pada *finance track* G20, yaitu Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Working Group / SFWG*). Sepanjang 2021, SFWG telah menghasilkan dua produk utama, yaitu *G20 Sustainable Finance Roadmap* dan *Synthesis Report*. Sementara itu, dari aspek stabilitas sistem keuangan, FSB telah menyusun *FSB Roadmap for Addressing Climate-related Financial Risks* untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap stabilitas sektor keuangan.

Diskusi tentang perkembangan ekonomi terkini juga dilakukan dalam kerangka kerja sama bilateral. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk membangun dan menjaga hubungan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan, serta memperjuangkan kepentingan BI dan/atau perekonomian Indonesia. Selama 2021, telah dilakukan sejumlah pertemuan dengan bank sentral mitra, antara lain dengan Central Bank Sri Lanka (CBSL), Swiss National Bank, Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Saudi Central Bank (SAMA). Topik utama dialog adalah pertukaran pandangan mengenai perkembangan perekonomian terkini, serta peninjauan dan penguatan kerja sama bilateral antara bank sentral. Pada kesempatan tersebut,

Bank Indonesia menyampaikan strategi bauran kebijakan, serta koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan yang aktif dilakukan dalam penanganan dampak COVID-19 di Indonesia.

Pemulihan ekonomi global yang berlanjut pascapelonggaran restriksi mobilitas dan sejumlah kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi krisis membentuk persepsi positif lembaga rating, pelaku pasar, maupun organisasi internasional.

Indonesia termasuk salah satu negara yang dapat mempertahankan *Sovereign Credit Rating (SCR)* di tengah penurunan SCR yang terjadi di sejumlah negara. Hal ini mencerminkan keyakinan lembaga pemeringkat terhadap kredibilitas kebijakan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi (Boks: *Sovereign Credit Rating Indonesia Terjaga di Tengah Divergensi Pemulihan Ekonomi*). Lembaga pemeringkat secara khusus menaruh perhatian terhadap perkembangan vaksinasi, kemajuan pemulihan ekonomi, serta kredibilitas kebijakan yang ditempuh oleh otoritas. Kondisi tersebut memperkuat urgensi upaya pengelolaan persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia melalui koordinasi intensif antar otoritas untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

IMF juga menilai positif sinergi kebijakan di Indonesia dalam menghadapi pandemi.

Pandangan tersebut dituangkan dalam laporan *IMF Article IV Consultation 2020*.⁷ Sinergi mencakup kebijakan pengendalian pandemi di sektor kesehatan, kebijakan stimulus fiskal, kebijakan moneter akomodatif, pelonggaran kebijakan makro dan mikroprudensial, serta kebijakan *burden sharing* Bank Indonesia dengan Pemerintah. Apresiasi dan catatan positif diberikan IMF terhadap sejumlah kebijakan makroekonomi Indonesia. Pertama, komitmen otoritas untuk secara bertahap mengembalikan batas atas defisit fiskal sebesar 3% dari PDB pada 2023. Kedua, penerapan kebijakan moneter akomodatif dengan tetap memperhatikan tingkat inflasi, melalui kebijakan suku bunga rendah dan pembelian SBN oleh BI dalam kondisi *extraordinary* saat ini. Ketiga, kelanjutan upaya reformasi struktural dengan penerapan UU Cipta Kerja dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi. IMF menilai Indonesia telah

⁷ Dipublikasikan pada Maret 2021.

menangani pandemi dengan respons sinergi kebijakan yang jelas, komprehensif, dan terkoordinasi. Selain itu, ketahanan ekonomi Indonesia yang terjaga dinilai sebagai cerminan kebijakan makroekonomi yang baik sejak sebelum pandemi.

OECD menilai positif respons kebijakan Indonesia pada 2020 untuk mengatasi dampak dari krisis COVID-19. Hal tersebut diungkapkan dalam publikasi 'OECD Economic Surveys: Indonesia 2021' pada Maret 2021.⁸ Dalam laporan tersebut, OECD menyoroti perkembangan dan respons kebijakan moneter dan fiskal selama 2020 terutama dalam merespons krisis COVID-19, efektivitas intervensi pemerintah dalam penanganan COVID-19, perkembangan inklusi keuangan, serta reformasi pasca-COVID-19. OECD menilai pemulihan ekonomi Indonesia akan terjadi secara bertahap, dengan penanganan pada sektor kesehatan menjadi faktor yang utama. Indonesia memiliki sumber daya alam dan tingkat populasi muda

8 Laporan OECD *Economic Surveys* dilaksanakan dua tahun sekali dengan tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan ekonomi Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi di Indonesia.

yang cukup sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi. Lebih lanjut, upaya mempercepat transisi menuju ekonomi hijau dan reformasi di bidang ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja), penciptaan lapangan kerja, serta program peningkatan keterampilan menjadi rekomendasi utama dalam laporan tersebut.

Pandangan yang positif juga diperoleh dari The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO).

Dalam *Consultation Report 2020*, AMRO menilai perekonomian Indonesia tetap tangguh dan *resilient* meski dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19. Kalibrasi bauran kebijakan dan stimulus telah memberi dukungan yang tepat waktu bagi sektor rumah tangga, bisnis, dan sektor keuangan terdampak, serta mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan. Sinergi kebijakan antar otoritas serta ketersediaan vaksin secara luas, diharapkan dapat mendukung *rebound* pertumbuhan ekonomi pada 2021. AMRO menggarisbawahi urgensi agar otoritas mempersiapkan *exit* dari paket kebijakan yang dilakukan saat ini untuk menghindari *cliff effect* dan memfasilitasi pemulihan ekonomi pascapandemi.

Sovereign Credit Rating Indonesia Terjaga di Tengah Divergensi Pemulihan Ekonomi

Memasuki 2021, indikasi pemulihan ekonomi mulai terlihat di negara maju dan negara berkembang meski dengan kecepatan yang berbeda.

Perbedaan tersebut terutama dipengaruhi oleh vaksinasi dan dukungan kebijakan yang berperan penting dalam mendukung pemulihan aktivitas ekonomi. Sejalan dengan perkembangan positif tersebut, dari sisi pergerakan SCR, *positive rating action* tiga lembaga pemeringkat utama (S&P, Moody's, dan Fitch) menunjukkan tren meningkat pada paruh kedua 2021. Peningkatan tersebut didukung oleh ekspektasi lembaga pemeringkat terhadap perbaikan fiskal serta keyakinan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah, yang didukung oleh keberlanjutan reformasi struktural. Ke depan, pergerakan SCR akan dipengaruhi oleh kecepatan pemulihan ekonomi dan kredibilitas kebijakan, di tengah masih tingginya ketidakpastian dan tantangan ekonomi global.

Di tengah upaya mendorong pemulihan ekonomi, Indonesia memperoleh afirmasi (penguatan) SCR dari sejumlah lembaga pemeringkat pada 2021. SCR Indonesia dipertahankan pada kelompok *Investment Grade* dengan peringkat dan *outlook* yang sama seperti hasil *review* pada 2020. Fitch (22 November 2021) dan S&P (22 April 2021) mempertahankan SCR Indonesia masing-masing pada level BBB/*outlook* stabil dan BBB/*outlook* negatif. Sedangkan, lembaga pemeringkat Jepang yaitu R&I (22 April 2021) dan JCR (22 Desember 2020) mempertahankan SCR Indonesia pada level BBB+/*outlook* stabil. Sementara, Moody's pada 2021 tidak melakukan *rating action*, sehingga SCR Indonesia tetap berada pada level Baa2/*outlook* stabil.

Keputusan sejumlah lembaga pemeringkat untuk mempertahankan SCR Indonesia mencerminkan keyakinan terhadap *creditworthiness* dan fundamental ekonomi. Secara umum, keyakinan atas prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih kuat serta beban utang pemerintah yang terjaga menjadi dasar bagi afirmasi SCR Indonesia. Faktor yang juga menjadi pertimbangan antara lain rekam jejak kebijakan yang berhati-hati (Fitch dan S&P), resiliensi ekonomi Indonesia terhadap gejolak eksternal yang didukung oleh kebijakan nilai tukar yang fleksibel, kredibilitas kebijakan moneter, akumulasi cadangan devisa (JCR dan R&I), serta ukuran ekonomi Indonesia yang besar (Moody's).

Penguatan SCR Indonesia merupakan bentuk pengakuan atas komitmen otoritas dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, melanjutkan reformasi struktural, dan mempertahankan kredibilitas kebijakan. Pencapaian ini perlu terus dipertahankan melalui penguatan sinergi antar otoritas guna mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Keberlanjutan implementasi reformasi fiskal dan struktural juga perlu dikawal karena menjadi aspek yang diperhatikan lembaga pemeringkat dalam menilai kredibilitas kebijakan otoritas untuk mendukung prospek ekonomi dalam jangka menengah.

Pemulihan ekonomi masih dibayangi ketidakpastian yang cukup tinggi. Indonesia perlu mewaspadai kemungkinan *negative rating action* atas SCR. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari

negative rating action Filipina yang mengalami revisi *outlook* menjadi negatif dengan SCR tetap pada level BBB (12 Juli 2021). Keputusan Fitch merevisi *outlook* Filipina mencerminkan peningkatan risiko kredit sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dan implikasi dari kebijakan yang ditempuh, serta pelemahan pada area ekonomi dan fiskal Filipina.

Lembaga pemeringkat memandangi prospek *Sovereign Credit Rating* Indonesia akan dipengaruhi oleh perkembangan pemulihan ekonomi serta kredibilitas kebijakan otoritas, termasuk komitmen konsolidasi fiskal. Secara umum, lembaga pemeringkat memiliki keyakinan terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia yang dinilai relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Lembaga pemeringkat juga

mengapresiasi langkah serta sinergi kebijakan yang ditempuh untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi. Selain itu, kinerja fiskal dan upaya perbaikan penerimaan pemerintah melalui implementasi reformasi perpajakan, kredibilitas kebijakan fiskal, dan komitmen konsolidasi fiskal menuju target defisit fiskal kembali ke 3% PDB pada 2023 juga menjadi perhatian. Indonesia perlu mewaspadaikan risiko pelemahan ekonomi Tiongkok, Fed *tapering*, serta isu domestik lain. Berbagai tantangan tersebut memperkuat pentingnya pengelolaan persepsi positif ekonomi Indonesia melalui koordinasi kebijakan yang intensif antar otoritas. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan menjaga kredibilitas kebijakan.

II.1.2. Kerja Sama untuk Memperkuat Resiliensi Sektor Keuangan

Fora kerja sama internasional menekankan pentingnya komitmen internasional untuk memperkuat resiliensi sektor keuangan. Bank Indonesia—yang mewakili Indonesia bersama Kementerian Keuangan—pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pemulihan ekonomi. Pada Oktober 2021, Financial Stability Board (FSB)⁹ melaporkan sejumlah pelajaran yang dapat diperoleh dari pandemi COVID-19 terutama dari perspektif stabilitas sistem keuangan. Tiga pelajaran dan aksi penting yang dapat dipetik dari laporan tersebut adalah:¹⁰

- a. **Ketahanan pasar dan kelembagaan.** Secara umum, sektor keuangan menunjukkan resiliensi di tengah krisis akibat pandemi COVID-19, yang merupakan hasil positif dari implementasi agenda reformasi sektor keuangan selama ini. Namun demikian, fungsi permodalan bank dan penyangga likuiditas selama pandemi memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya ketika dukungan kebijakan akan ditarik secara bertahap. Sementara itu, gejolak pasar pada Maret 2020 (awal pandemi) menunjukkan perlunya memperkuat ketahanan lembaga keuangan nonbank (LKNB). Terkait hal ini, FSB sedang menjalankan program kerja yang komprehensif untuk mengases kondisi LKNB dan mengidentifikasi langkah yang diperlukan untuk memperkuat resiliensi LKNB.
- b. **Ketahanan operasional.** COVID-19 menunjukkan pentingnya manajemen risiko operasional yang efektif sebelum terjadi *shock*. FSB akan mengembangkan praktik yang baik (*best practices*) mengenai penyediaan jenis informasi yang diperlukan otoritas, termasuk informasi terkait insiden siber, untuk menjaga stabilitas sistem

9 Financial Stability Board (FSB) adalah organisasi internasional yang memantau dan membuat rekomendasi tentang sistem keuangan global. FSB didirikan oleh G20 pada April 2009 dan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan dan rekomendasi kebijakan sektor keuangan kepada anggota G20. Keanggotaan terdiri dari 24 negara yang diwakili oleh Kementerian Keuangan, bank sentral dan/atau otoritas pengawas serta dan organisasi internasional lain, antara lain IMF, World Bank, dan Bank for International Settlements.

10 *Lessons learnt from the COVID-19 pandemic from a financial stability perspective: Final report*. Retrieved from: *Lessons learnt from the COVID-19 pandemic from a financial stability perspective: Final report - Financial Stability Board (fsb.org)*

keuangan. FSB juga melakukan asesmen mengenai manajemen risiko pemanfaatan pihak ketiga dan *outsourcing*, serta akan mengembangkan panduan pengawasan lembaga keuangan pada penyedia layanan penting/kritikal.

- c. **Kesiapsiagaan krisis.** Pandemi menunjukkan pentingnya kerja sama, koordinasi, dan pembagian risiko antarnegara yang efektif. FSB akan mengidentifikasi serangkaian praktik yang baik untuk meningkatkan kesiapsiagaan, dan memfasilitasi pengelolaan dan penyelesaian krisis keuangan antarnegara yang dapat memengaruhi *Global Systemically Important Banks (G-SIB)*.

G20 menyambut baik laporan kemajuan FSB tentang transisi LIBOR yang diharapkan dapat mengurangi kerentanan dari penggunaan LIBOR.¹¹ Selain itu, G20 juga mendukung laporan akhir FSB tentang usulan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan *Money Market Fund (MMF)*.¹² G20 akan menilai dan mengatasi kerentanan MMF, mengenali kebutuhan untuk menyesuaikan tindakan, serta mempertimbangkan aspek lintas batas/antarnegara. FSB akan bekerja sama dengan International Organization of Securities Commissions (IOSCO), untuk mengintegrasikan kemajuan yang dicapai oleh anggota dalam mengadopsi reformasi untuk meningkatkan ketahanan MMF hingga akhir 2023, langkah tersebut juga akan ditindaklanjuti dengan penilaian efektivitas langkah-langkah yang diadopsi oleh yurisdiksi dalam menangani risiko stabilitas keuangan hingga akhir 2026.

Sejalan dengan potensi risiko pembalikan arus modal dari exit policy negara maju, upaya memperkuat Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) terus dilakukan sebagai second line of defense. ASEAN+3 telah meningkatkan porsi fasilitas Chiang Mai *Initiative Multilateralization (CMIM)* yang dapat ditarik tanpa didahului dengan aktivasi fasilitas IMF (*CMIM IMF De-Linked Portion*) dari 30% menjadi 40%, dan memberi fleksibilitas dalam pemanfaatan kerja sama CMIM dengan mata uang lokal yang dilakukan dengan prinsip *voluntary* dan *demand driven*.

Dalam lingkup kerja sama bilateral, BI kembali memperpanjang kerja sama keuangan internasional

11 Dalam *FMCBG Communique* Juli 2021, dan *Progress report to the G20 on LIBOR transition issues* Juli 2021.

12 Dalam *FMCBG Communique* Oktober 2021.

berupa **Bilateral Swap Arrangement (BSA)** dengan Jepang pada 14 Oktober 2021 serta kerja sama **Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA)** dan **Bilateral Repo Line (BRL)** dengan **Monetary Authority of Singapore (MAS)** pada 5 November 2021. BSA Indonesia-Jepang merupakan perjanjian bilateral pertukaran mata uang antara BI dengan Bank of Japan—sebagai agen dari Kementerian Keuangan—dalam bentuk *swap* antara rupiah dengan dolar AS dan/atau yen Jepang sampai dengan USD22,76 miliar atau nilai yang setara dalam yen Jepang. Sementara LCBSA BI-MAS memungkinkan dilakukan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai SGD9,5 miliar atau IDR100 triliun (ekuivalen sekitar USD7 miliar). Sedangkan BRL BI-MAS memungkinkan dilakukan transaksi repo antara kedua bank sentral untuk mendapat likuiditas dalam dolar AS senilai USD3 miliar dengan menjaminkan obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh negara-negara G3 (Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman) yang dimiliki oleh kedua bank sentral.

Perpanjangan kerja sama internasional juga diiringi dengan kerja sama Local Currency Settlement (LCS). Kerja sama LCS ditujukan untuk mendorong penyelesaian transaksi bilateral dalam mata uang masing-masing negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu di pasar valuta asing domestik. LCS memberikan alternatif penyelesaian transaksi dagang, investasi, dan *income transfer* (remitansi) dalam mata uang lokal. Implementasi LCS juga merupakan salah satu upaya BI dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya di sektor ekspor, impor dan investasi. Penggunaan LCS memberi manfaat langsung kepada pelaku usaha, antara lain: (i) biaya konversi transaksi dalam valuta asing lebih efisien melalui *direct quotation*, (ii) tersedianya alternatif pembiayaan perdagangan dan investasi langsung dalam mata uang lokal, (iii) tersedianya alternatif instrumen lindung nilai dalam mata uang lokal, dan (iv) diversifikasi eksposur mata uang yang digunakan dalam penyelesaian transaksi luar negeri.

BI telah memiliki kerja sama Local Currency Settlement (LCS) berbasis Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) dengan sejumlah otoritas negara mitra dagang utama, yaitu dengan Thailand, Malaysia,

Jepang, dan Tiongkok. Pada 2021, BI berupaya melanjutkan penguatan implementasi kerja sama LCS dengan Malaysia dan Jepang, serta memulai implementasi kerja sama LCS Indonesia dengan Tiongkok. Dalam rangka penguatan implementasi LCS dengan negara mitra, selama 2021 telah disepakati penguatan kerja sama, yaitu:

- 1. LCS Bank Indonesia dengan Bank Negara Malaysia (BNM).** BI dan BNM menyepakati penguatan kerangka penyelesaian transaksi LCS menggunakan Rupiah-Ringggit yang telah diimplementasikan sejak 2 Januari 2018. Kerja sama LCS yang semula hanya untuk transaksi perdagangan, kini diperluas mencakup *underlying* transaksi LCS dengan menambahkan investasi langsung dan *income transfer* (termasuk remitansi). Selain itu, penguatan kerja sama LCS antara BI dan BNM juga meliputi pelonggaran aturan transaksi valas a.l. perluasan instrumen lindung nilai, peningkatan *threshold* nilai transaksi tanpa dokumen *underlying* sampai dengan USD200.000 per transaksi, dan penambahan bank yang ditunjuk sebagai bank ACCD di masing-masing negara. Penguatan kerangka LCS dalam Rupiah-Ringggit mulai berlaku efektif sejak 2 Agustus 2021.
- 2. LCS ACCD Indonesia dan Jepang.** Pada 5 Agustus 2021, BI-JMOF telah menyepakati penguatan kerangka kerja sama LCS antara kedua negara yang diimplementasikan sejak 31 Agustus 2020. Penguatan dilakukan dengan memberikan pelonggaran aturan transaksi valas dalam kerangka penyelesaian transaksi bilateral kedua negara dengan rupiah-yen, antara lain mencakup perluasan instrumen *hedging* (lindung nilai), pelaksanaan lindung nilai atas dasar proyeksi perdagangan dan investasi, peningkatan fleksibilitas transfer atas rekening IDR di Jepang, dan peningkatan *threshold* nilai transaksi tanpa dokumen *underlying* sampai dengan USD500.000 per transaksi. Penguatan kerangka kerja sama yang berlaku efektif 5 Agustus 2021.
- 3. LCS ACCD BI dan People's Bank of China (PBC).** BI dan PBC secara resmi memulai implementasi

kerangka kerja sama LCS ACCD antara Indonesia dan Tiongkok pada 6 September 2021. Kerangka kerja sama ini disusun berdasarkan Nota Kesepahaman yang telah disepakati BI dan PBC pada 30 September 2020. Kerangka kerja sama dimaksud antara lain meliputi penggunaan kuota nilai tukar secara langsung (*direct quotation*) dan relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing antara rupiah dan yuan. Dalam mendukung operasionalisasinya, BI dan PBC menunjuk beberapa bank di negara masing-masing sebagai bank ACCD untuk memfasilitasi transaksi rupiah dan yuan.

Kerjasama LCS antara Indonesia dan Tiongkok memiliki potensi pemanfaatan yang besar seiring hubungan perdagangan dan investasi yang tinggi antara kedua negara. Dari sisi perdagangan, data rerata tahun 2016 s.d 2021 (Agustus) menunjukkan pangsa ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai $\pm 16\%$, sedangkan pangsa impor Indonesia dari Tiongkok di atas 24%. Dari sisi investasi, data *Coordinated Direct Investment Survey* (CDIS) IMF tahun 2019 menunjukkan Tiongkok merupakan investor *Foreign Direct Investment* (FDI) terbesar ke-8 bagi Indonesia, sementara Indonesia merupakan negara tujuan FDI terbesar ke-12 bagi Tiongkok.

II.1.3. Kerja Sama Sistem Pembayaran dan Inovasi Digital

Peran sistem pembayaran yang sangat penting dalam perekonomian global menjadi perhatian berbagai fora kerja sama internasional. Sejak ditetapkan pada Presidensi Saudi Arabia tahun 2020, G20 terus mendorong implementasi *G20 Roadmap to Enhance Cross Border Payments* untuk mewujudkan pembayaran lintas batas negara yang cepat dan murah, sekaligus lebih transparan dan inklusif. G20

telah menyetujui *G20 Roadmap to Enhance Cross Border Payments* pada 2020. Kerja sama tersebut terdiri dari lima fokus area dan sembilan belas *building block* (BB) yang saling terkait. Penyusunan *roadmap* ditujukan untuk mengatasi friksi atau hambatan nyata pada pembayaran lintas batas negara, yang meliputi komitmen dan visi bersama antara sektor publik dan swasta untuk memperbaiki pembayaran lintas batas (Fokus Area 1), koordinasi pengaturan dan pengawasan (Fokus Area 2), perbaikan infrastruktur dan pengaturan/pengelolaan sistem pembayaran untuk mendukung kebutuhan pembayaran lintas batas negara (Fokus Area 3), peningkatan kualitas data dan pemrosesan untuk mengatasi fragmentasi (Fokus Area 4), dan eksplorasi atas potensi dari bentuk-bentuk sistem pembayaran baru (Fokus Area 5).

Pada 2021, pekerjaan terkait G20 Cross Border Payments Roadmap telah berhasil menyelesaikan fondasi awal guna implementasi yang kuat menuju target penyelesaian pada 2027. Pekerjaan yang dikoordinasikan oleh FSB dan CPMI tersebut antara lain mencakup inventarisasi dan analisis sistem pembayaran dan pengaturan yang berlaku, serta perkembangan di berbagai yurisdiksi terkait pembayaran lintas negara. Inventarisasi yang dilakukan mencakup area standar dan panduan internasional, kerangka data nasional dan regional, jam operasional, akses, elemen umum dari perjanjian/skema tingkat layanan, mekanisme pembayaran, keterkaitan antar sistem pembayaran, dan eksplorasi desain sistem pembayaran di masa mendatang. *Roadmap* ini merepresentasikan berbagai isu operasional yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan pembayaran lintas batas negara, seperti isu penyediaan likuiditas dan adopsi standar ISO 20022. Di sisi lain, *roadmap* juga berusaha menjawab arah kebutuhan dan tren ke depan melalui

eksplorasi area yang bersinggungan dengan CBDC dan *stablecoins*.

Dalam rangka memastikan efektivitas dan ketepatan waktu implementasi *roadmap*, FSB menetapkan serangkaian target capaian untuk enam tahun ke depan. Penetapan target global tersebut dilandasi prinsip bahwa target yang disusun harus terkait langsung dengan tantangan yang ada, mampu mencerminkan perkembangan yang telah dicapai, cukup ambisius, dapat dikomunikasikan dengan baik, dan relevan terhadap pemangku kepentingan yang luas. Dalam pelaksanaannya nanti, implementasi atas target global tersebut akan dilakukan untuk seluruh segmen pasar yaitu *wholesale*, ritel, dan remitansi, serta mengacu pada tiga panduan utama yaitu (1) bagaimana target dapat diukur dan sumber data yang diperlukan, (2) bagaimana cara untuk memantau pencapaian target tersebut, dan (3) frekuensi dari pengumpulan data dan publikasi perkembangan.

Presidensi G20 Indonesia pada 2022 akan mendorong konektivitas sistem pembayaran dan pertukaran data pembayaran lintas negara. Kesuksesan *roadmap* ini tentu tidak hanya bergantung pada hasil analisis yang dilakukan, namun bagaimana G20 kemudian mampu mengadopsi proposal yang spesifik dan praktikal. Oleh karena itu, Presidensi G20 Indonesia akan membangun momentum dan menempatkan prioritas pada upaya bersama untuk mencapai keterhubungan antar sistem pembayaran (*BB13 – Pursue Interlinking of Payment Systems*) dan mengurangi hambatan pertukaran data antarnegara melalui harmonisasi protokol API (*BB15 – Harmonise API for Data Exchange*). Pemilihan fokus pada BB13 dan BB15 dilakukan sejalan dengan arah Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dalam mendorong pengembangan ekonomi keuangan digital, terutama dalam mendukung (i) industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif, (ii) integrasi, interkoneksi, interoperabilitas (3I), keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran, dan (iii) kebijakan harga untuk efisiensi.

Presidensi G20 Indonesia pada 2022 juga akan mendorong kelanjutan diskusi global terkait CBDC.

Pada 2021, G20 telah menerima laporan bersama CPMI-BISIH-IMF-WB terkait peran CBDC dalam pembayaran lintas batas negara. Dalam laporan tersebut digarisbawahi bahwa CBDC berpotensi untuk mewujudkan pembayaran lintas batas negara yang lebih cepat, terjangkau, dan inklusif. Namun untuk mewujudkan potensi tersebut, masih diperlukan berbagai upaya baik di tataran domestik maupun internasional, khususnya untuk mempelajari peluang sekaligus risiko yang ditimbulkan dari penggunaan CBDC. Oleh karena itu, sebagai bagian dari area pekerjaan BB19 (*Factor an International Dimension into CBDC Designs*) di tahun 2022, Presidensi G20 Indonesia akan mendorong kolaborasi dalam rangka mewujudkan interoperabilitas CBDC, serta membangun pemahaman bersama yang lebih kuat atas implikasi makro-finansial dari CBDC.

Selanjutnya, sebagai upaya memperkuat kerja sama internasional di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia secara aktif melakukan perluasan kerja sama dengan bank sentral atau otoritas mitra. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman/*memorandum of understanding* (MoU) dalam bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan digital (SP-IKD), anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT), serta kerja sama dalam kerangka *structured bilateral cooperation* (SBC). Sebagai bentuk implementasi kerja sama, Bank Indonesia telah menjalin kesepakatan di bidang APU-PPT dengan Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) yang berlaku sejak Juni 2021. Nota kesepahaman tersebut mencakup pertukaran informasi terkait pengawasan, kerangka kebijakan, dan metodologi APU-PPT.

BI juga melakukan perluasan kerja sama pada bidang SP-IKD dan APU-PPT dengan Central Bank of the United Arab Emirates (CBUAE) yang berlaku sejak November 2021. Secara umum, kerja sama BI-CBUAE mencakup tiga bidang utamanya yakni inovasi digital dalam bidang layanan keuangan dan pembayaran, sistem pembayaran lintas batas termasuk sistem pembayaran ritel, serta kerangka kebijakan APU-PPT. Kesepakatan dengan BDCB dan CBUAE tersebut merupakan salah

satu capaian dalam perluasan kerja sama bilateral Bank Indonesia, khususnya pada bidang APU-PPT. Capaian kerja sama tersebut sekaligus merupakan kontribusi BI dalam mendukung upaya keanggotaan Indonesia dalam *Financial Action Task Force (FATF)* dan mencerminkan komitmen BI dalam memerangi tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme.

II.1.4. Kerja Sama *Sustainable Finance*

Fora kerja sama ASEAN menaruh perhatian pada upaya pengembangan *sustainable finance*. ASEAN mengembangkan *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance* yang akan menjadi panduan dan bahasa umum bagi negara anggota dalam mengembangkan sistem keuangan dan pembiayaan yang berbasis lingkungan. Selain itu, negara ASEAN juga memiliki *ASEAN Sustainable Banking Principles*. Prinsip ini berfungsi sebagai panduan bagi bank sentral di ASEAN dalam mengembangkan praktik-praktik perbankan berbasis lingkungan yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Pembahasan isu *sustainable finance* oleh negara ASEAN merupakan kontribusi bank sentral dalam *sustainable finance journey*, serta mendorong bank sentral untuk mempromosikan adopsi prinsip *sustainable finance* di sektor keuangan.

EMEAP telah melakukan survei untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh negara anggota dalam penyusunan kebijakan terkait perubahan iklim. Respons dari anggota mengindikasikan beberapa kendala yang bersifat global, seperti kurangnya data dan metodologi untuk mengukur risiko iklim. Terdapat beberapa kendala domestik/spesifik, seperti kawasan Asia Pasifik menghadapi transisi yang lebih dalam menuju *net-zero* dibandingkan wilayah lainnya. Asia Pasifik juga terekspos risiko fisik yang unik dan ukuran pasar modal *sustainable finance* yang masih terbatas.

Pembiayaan berkelanjutan dan ekonomi hijau menjadi topik utama dalam diskusi di jalur keuangan (*Finance Track*) G20. Pada April 2021, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 membentuk Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Working Group* atau SFWG). SFWG mendiskusikan berbagai topik dalam rangka mendukung transisi menuju ekonomi hijau, antara lain upaya meningkatkan pembiayaan global dan transfer teknologi. Penyusunan taksonomi ekonomi

dan keuangan hijau, penyediaan data, dan pelaporan/pengungkapan pada laporan keuangan, turut menjadi topik bahasan yang mengemuka. Selanjutnya, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 mengesahkan *G20 Sustainable Finance Roadmap (SF Roadmap)* dan *Synthesis Report* pada Oktober 2021.

***SF Roadmap* merupakan dokumen multi-tahun tentang upaya G20 untuk mengembangkan keuangan berkelanjutan.** *SF Roadmap* disusun dengan memperhatikan kondisi saat ini, analisis kesenjangan, dan rencana tindakan untuk pengembangan keuangan berkelanjutan. Dokumen ini merekomendasikan tindakan konkret, tepat waktu, dan prioritas untuk mengatasi hambatan yang ada. *Roadmap* dapat disesuaikan untuk mencerminkan prioritas Presidensi G20 di masa depan, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing negara anggota. Meski saat ini masih berfokus pada iklim, ke depan akan mencakup isu keberlanjutan lainnya seperti keanekaragaman hayati, alam, dan isu terkait *Sustainable Development Goals (SDGs)*. *SF Roadmap* mempertimbangkan lima bidang yaitu: (i) pengembangan pasar dan pendekatan untuk menyelaraskan investasi dengan tujuan keberlanjutan; (ii) informasi yang konsisten, dapat dibandingkan, dan berguna untuk mengambil keputusan tentang risiko, peluang, dan dampak keberlanjutan; (iii) penilaian dan pengelolaan risiko iklim dan keberlanjutan; (iv) peran IFI, keuangan publik dan insentif kebijakan; dan (v) masalah lintas sektor. Masing-masing bidang memiliki prioritas dan tindakan yang diperlukan untuk membantu meningkatkan keuangan berkelanjutan, guna mendukung Agenda 2030 dan *Paris Agreement*. Penerapan *SF Roadmap* bersifat sukarela dan tidak mengikat, serta memberi ruang fleksibilitas bagi negara yang berpartisipasi. Selain itu, implementasi dari *SF Roadmap* akan didukung oleh organisasi internasional terkait.

***Synthesis Report* mencakup informasi mengenai hasil kegiatan SFWG selama 2021.** *Report* didasari kajian dan masukan yang disampaikan organisasi internasional dan mitra akademis, serta dari konsultasi dengan pemangku kepentingan (termasuk sektor swasta). Dokumen ini meninjau praktik terkini dan mengusulkan serangkaian rekomendasi untuk kemajuan dalam tiga bidang prioritas: (i) meningkatkan komparabilitas dan interoperabilitas pendekatan untuk menyelaraskan investasi dengan tujuan keberlanjutan; (ii) mengatasi tantangan informasi dengan meningkatkan

pelaporan dan pengungkapan keberlanjutan; dan (iii) meningkatkan peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam mendukung tujuan *Paris Agreement* dan Agenda 2030. SFWG berencana menyusun laporan kemajuan terhadap pelaksanaan *SF Roadmap* dan menyusun *Synthesis Report* untuk dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20.

G20 juga menyambut baik agenda keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Financial Stability Board (FSB). FSB menyampaikan dua laporan kepada G20, yaitu:

1. Laporan pertama berisi analisis ketersediaan data untuk mendukung asesmen terhadap risiko stabilitas keuangan yang bersumber dari perubahan iklim. Laporan ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi. FSB merekomendasikan otoritas keuangan mengambil langkah untuk meningkatkan kualitas data tentang eksposur lembaga keuangan terhadap risiko iklim. Lembaga keuangan diharapkan dapat

mengembangkan metode pengukuran/metrik risiko iklim dan meningkatkan kerja sama untuk mendukung ketersediaan dan konsistensi data.

2. Laporan kedua. FSB merekomendasikan promosi pengungkapan terkait iklim yang konsisten, dapat diperbandingkan secara global, dan andal. Otoritas keuangan diharapkan dapat mendorong implementasi pengungkapan atau panduan yang konsisten. Rekomendasi *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* digunakan sebagai referensi utama untuk perusahaan non keuangan dan pengungkapan lembaga keuangan, sesuai dengan kondisi di masing-masing negara.

Negara anggota G20 menyambut baik FSB *Roadmap for Addressing Financial Risk from Climate Change*. Dokumen ini akan melengkapi diskusi di G20 yang terkait dengan pemantauan terhadap risiko perubahan iklim.

Presidensi G20 Indonesia: Memimpin Pemulihan Global yang Merata dan Kuat

Dunia masih berjuang untuk melawan penyebaran virus dan mengatasi dampaknya setelah terpukul akibat pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020.

Beberapa negara saat ini masih berjuang mengatasi kembali meningkatnya angka kasus baru COVID-19. Meskipun vaksin sudah berhasil ditemukan dan distribusinya telah disetujui pada akhir tahun 2020, produksi vaksin masih terbatas. Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi, khususnya pada negara berkembang. Hal ini mengakibatkan pemulihan ekonomi global yang tidak merata.

Selain mengalami disrupsi ekonomi global akibat pandemi COVID-19, perekonomian global juga menghadapi sejumlah tantangan lain serta peluang.

Tantangan perubahan iklim dan bencana alam juga dapat mengakibatkan krisis. Tantangan ini berisiko memberikan dampak yang lebih bersifat jangka panjang dan kompleks dibandingkan pandemi COVID-19. Di sisi lain, pandemi juga memberikan momentum akselerasi digitalisasi. Dalam konteks ini, negara-negara dapat memanfaatkan peluang ini untuk mendorong produktivitas melalui pemanfaatan teknologi digital.

Di tengah tantangan dan peluang yang dihadapi dunia tersebut, peran dan kepemimpinan G20 menjadi makin penting.

G20 bekerja sama untuk menangani akar permasalahan dari produksi dan distribusi vaksin COVID-19 yang belum memadai. Selain itu, untuk mendukung pemulihan ekonomi, G20 juga perlu fokus pada upaya untuk mengatasi risiko perubahan iklim, melanjutkan agenda reformasi struktural, dan meningkatkan resiliensi sektor keuangan. Pada 2021, G20 di bawah Presidensi Italia telah melakukan upaya-upaya untuk mendukung pemulihan global. Pertama, komitmen sebesar USD14,5 miliar untuk mendukung inisiatif *the Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A)*.

Kedua, komitmen untuk membagikan 1,2 miliar dosis vaksin melalui Fasilitas *COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX)*. Ketiga, G20 memberikan dukungan terhadap alokasi umum *Special Drawing Rights (SDR)* IMF untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang cadangan aset global guna mendukung negara yang rentan dalam menangani pandemi.

Di tengah upaya tersebut, pemulihan ekonomi global diperkirakan masih tidak sinkron dan belum merata.

Negara-negara maju –yang memiliki lebih banyak sumber daya dan akses ke vaksin– pulih lebih awal, sementara negara berkembang dan berpenghasilan rendah pulih lebih lambat. Situasi ini akan memiliki implikasi yang signifikan karena negara maju mungkin akan menghentikan stimulus kebijakan untuk mengatasi pandemi lebih cepat dibandingkan negara-negara berkembang. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya pengetatan kondisi keuangan global dan mendorong arus modal keluar dari negara-negara berkembang. Selain itu, kerusakan yang mendalam pada ekonomi akibat pandemi diperkirakan akan meninggalkan dampak yang berkepanjangan dan membekas (*scarring effect*) sehingga menambah beban bagi negara-negara dalam mendorong pemulihan. Pada 2022, ekonomi global diperkirakan masih menghadapi risiko transisi perubahan iklim, serta perlu menghadapi tantangan dan mengambil peluang dari peningkatan digitalisasi.

Melanjutkan kepemimpinan Italia pada 2021, Indonesia perlu bersiap menyusun strategi dalam menghadapi berbagai tantangan yang sedang dialami oleh perekonomian global.

Dengan tema *“Recover Together, Recover Stronger”* Presidensi G20 Indonesia akan fokus pada upaya mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi, dan memastikan pertumbuhan

yang keberlanjutan dan inklusif. Dalam mencapainya, Presidensi G20 Indonesia memiliki 6 (enam) agenda prioritas di jalur keuangan (*finance track*), sebagai berikut.

1. Exit strategy to support recovery

Memastikan kebijakan *exit strategy* yang efektif dan dapat memitigasi efek rambatan sebagai prioritas bagi pembuat kebijakan di setiap negara. Normalisasi kebijakan moneter negara maju akan memengaruhi perekonomian global, terutama pelarian arus modal dari negara berkembang dan berdampak pada stabilitas sistem keuangan global. Agenda ini akan fokus pada strategi kebijakan untuk pulih bersama dari krisis, yang dapat dicapai melalui *framework of policy mix* yang *well calibrated, well planned, dan well communicated*. Efektivitas kebijakan strategi ini perlu didukung dengan tahapan dan waktu yang tepat serta koordinasi yang kuat dan komunikasi yang jelas antarnegara anggota.

2. Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth

Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan yang besar kepada perekonomian serta menyebabkan terjadinya dampak jangka panjang yang dapat menghambat pemulihan ekonomi dan produktivitas (*scarring effect*). Agenda ini fokus pada mitigasi dampak jangka panjang untuk mengatasi *scarring effect* dari pandemi. Beberapa area yang menjadi perhatian adalah aspek ketenagakerjaan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan.

3. Payment systems in the digital era

Pandemi COVID-19 telah meningkatkan adopsi pembayaran digital. Pada 2020, di bawah Kepresidenan Arab Saudi, G20 mengesahkan *G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payments* (CBP), yang bertujuan untuk mengatasi empat tantangan, yaitu biaya tinggi, kecepatan rendah, akses terbatas, dan kurangnya transparansi. Presidensi G20 Indonesia akan melanjutkan pembahasan mengenai implementasi dari keseluruhan

Roadmap tersebut, dengan dua aspek akan menjadi fokus perhatian Presidensi Indonesia, yaitu keterhubungan sistem pembayaran untuk transaksi lintas batas negara dan harmonisasi protokol *Application Programming Interfaces* (API) untuk pertukaran data. Selain CBP, agenda ini juga fokus pada pembahasan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) untuk melanjutkan diskusi mengenai CBDC, khususnya mendorong interoperabilitas CBDC dan pendalaman implikasi makro-finansial atas implementasi CBDC.

4. Sustainable Finance

Peningkatan frekuensi dan dampak bencana alam akibat perubahan iklim terbukti menyebabkan disrupsi ekonomi sehingga memerlukan upaya untuk mengatasi isu perubahan iklim, terutama pengembangan pembiayaan berkelanjutan. Pembahasan *sustainable finance* akan diarahkan untuk memastikan keberlanjutan dan implementasi *G20 Sustainable Finance Roadmap*, dengan pengelompokan pada tiga fokus area, yaitu (i) *developing a framework for transition finance*; (ii) *enhancing accessibility and affordability of sustainable finance instruments, and*; (iii) *discussing policy levers that incentivize financing and investment towards transition activities*.

5. Digital Financial Inclusion

Pandemi COVID-19 telah memperlebar kesenjangan masyarakat kelompok rentan, termasuk kaum perempuan dan UMKM. Namun demikian, perkembangan ekonomi dan pembayaran digital yang pesat telah dapat meningkatkan akses individu dan UMKM pada layanan keuangan dan sumber pembiayaan. Perkembangan tersebut dapat mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif. Pembayaran digital juga memudahkan program pelayanan dan perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah untuk menolong kelompok rentan dan UMKM. Hal ini diharapkan dapat membuka akses pada layanan sektor

keuangan. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti kurangnya literasi digital dan keuangan, serta ketidakseimbangan perkembangan infrastruktur digital. Indonesia berencana membahas integrasi sisi penawaran dan permintaan sektor keuangan untuk mempromosikan inklusi keuangan, sekaligus meningkatkan produktivitas dan inklusi ekonomi.

6. *International Taxation*

G20 telah menetapkan target ambisius dalam agenda perpajakan internasional untuk mencapai sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern. Meski telah tercapai kemajuan, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan G20 dalam agenda reformasi perpajakan internasional. Presidensi G20 2022 akan melanjutkan diskusi implementasi dari kesepakatan global terkait perpajakan digital yang telah dicapai pada 2021.

Presidensi G20 Indonesia pada jalur keuangan pada 2022 juga akan melanjutkan pembahasan tentang isu-isu lanjutan (*legacy*) dari forum G20 di presidensi sebelumnya. Isu-isu tersebut antara lain (i) integrasi risiko pandemi dan iklim dalam pemantauan risiko global (*global risk monitoring*); (ii) penguatan *Global Financial Safety Net*; (iii) peningkatan arus modal; (iv) *Data Gap Initiatives*; (v) peningkatan reformasi regulasi sektor keuangan; (vi) penguatan keberlanjutan dan transparansi utang; (vii) percepatan agenda infrastruktur; (viii) pemanfaatan dukungan *Multilateral Development Banks*; (ix) penguatan *Pandemic Prevention, Preparedness and Response*; dan (x) dukungan berkelanjutan untuk menarik investasi sektor swasta di negara-negara berpenghasilan rendah, seperti di kawasan Afrika, melalui *Compact with Africa* (CwA). Isu-isu lanjutan ini merupakan agenda yang bersifat *multi-year* dan relevan untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai perkembangan lingkungan strategis global.

Keseluruhan rangkaian agenda G20 tersebut akan dibahas secara berjenjang. Pertama, setiap agenda akan didiskusikan pada tataran teknis di tingkat kelompok kerja (*working group*). Kedua, agenda yang telah dibahas di kelompok kerja kemudian dieskalasi ke tingkat deputi, termasuk untuk penyusunan konsep kesepakatan (*komunike*). Ketiga, pembahasan agenda akan berlanjut pada tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, termasuk menyepakati *komunike* Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang telah disusun oleh Deputi. Terakhir, berdasarkan pembahasan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral serta mengacu pada *komunike* yang telah disetujui, hal-hal yang merupakan isu strategis akan dieskalasi lebih lanjut untuk diadopsi dalam *G20 Leaders' Declaration* pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dihadiri oleh para Kepala Negara G20. Dalam KTT tersebut, seluruh negara anggota G20 menyatakan komitmen, harapan, dan pandangan mengenai isu-isu yang dibahas dalam seluruh rangkaian kegiatan G20.

Presidensi G20 Indonesia dimulai dengan agenda Pertemuan Pertama tingkat Deputi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada 9-10 Desember 2021 di Bali dengan format *hybrid*. Diskusi fokus pada agenda prioritas yang akan dibawakan oleh Presidensi Indonesia selama tahun 2022, serta isu terkini terkait pemulihan ekonomi, risiko terhadap perekonomian global, arsitektur keuangan global, pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan infrastruktur dan topik perpajakan internasional. Mendahului pertemuan tersebut, Presidensi G20 Indonesia juga menyelenggarakan seminar internasional dengan tema "*Recover Together, Recover Stronger*" yang menghadirkan pembicara *high level* dari beberapa negara G20 lain dan organisasi internasional.

Di bawah kepemimpinan Indonesia, G20 diharapkan tidak hanya dapat mengawal pemulihan global yang kuat dan inklusif, namun juga bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Pertama, Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Kedua, Presidensi G20 Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan (*showcasing*) berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada

dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pascapandemi. Ketiga, pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, Presidensi G20 Indonesia tidak hanya mencatatkan sejarah di ranah global dengan menuntun perekonomian global keluar dari krisis akibat pandemi, namun juga memberikan manfaat nyata bagi pemulihan ekonomi nasional.

II.2.1. Kerja Sama Perdagangan Internasional

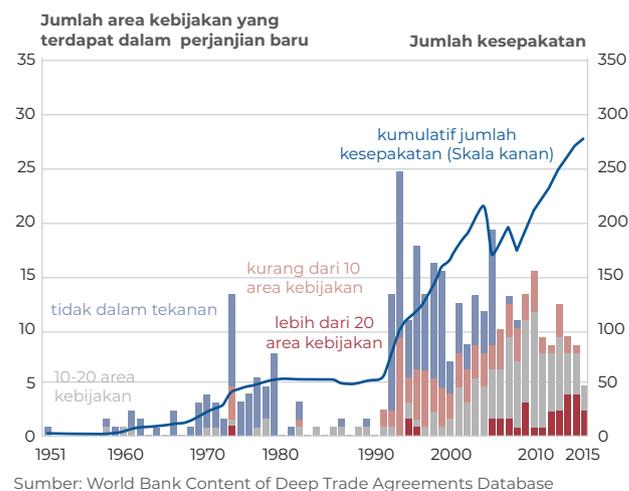
Jalanan perjanjian perdagangan internasional meningkat signifikan dengan cakupan yang meluas.

Hal itu tercermin dari keberadaan 50 perjanjian perdagangan pada 1990 yang kemudian mencapai 279 perjanjian pada akhir 2015 (Grafik 2.1). Cakupan aspek yang diatur dalam perjanjian juga makin luas. Perjanjian perdagangan tidak lagi terbatas pada penurunan tarif perdagangan barang, namun juga mencakup antara lain perdagangan jasa, investasi, ketenagakerjaan, hak kekayaan intelektual, dan *electronic commerce* (sering disebut *deep trade agreement*).

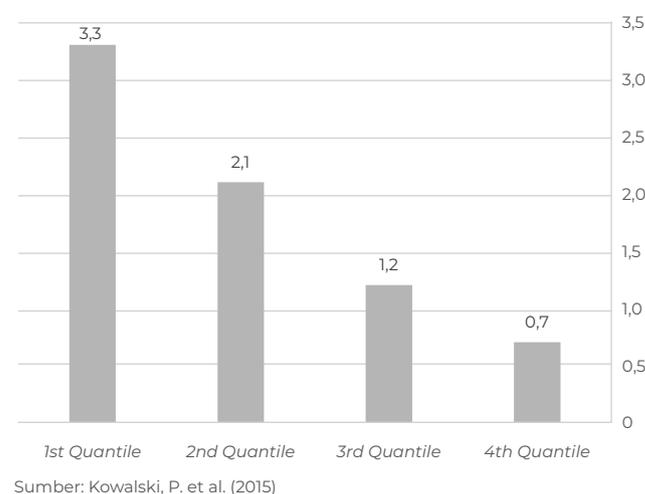
Perjanjian perdagangan dengan cakupan makin dalam terbukti meningkatkan keterkaitan sebuah negara dengan *global value chain (GVC)*.

Keterkaitan tersebut tercermin dari adanya pengaruh terhadap *backward and forward linkages* industri secara global (Boffa, Jensen, & Solleder, 2017). *Deep trade agreement* menstimulasi GVC melalui kemudahan perdagangan lintas batas, penurunan biaya bahan baku/produksi, serta tersedianya disiplin umum yang terstandarisasi antarnegara (Ruta, 2017). Hal ini menjadi penting mengingat $\pm 70\%$ perdagangan internasional saat ini melibatkan rantai nilai global, yang akan berkontribusi positif bagi perkembangan industri nasional, meningkatkan daya saing perekonomian. Kondisi tersebut dapat menopang pertumbuhan ekonomi dan GDP per kapita. Grafik 2.2 menunjukkan bahwa makin tinggi keterlibatan sebuah negara dalam GVC maka makin tinggi pertumbuhan GDP per kapita suatu negara.

Grafik 2.1 Jumlah *Deep Trade Agreements* Terus Meningkat (1955-2015)



Grafik 2.2 Partisipasi dalam *Global Value Chain* dan Pertumbuhan GDP per kapita (%)



Indonesia terus melakukan reformasi struktural di bidang perdagangan dengan menjalin kerja sama perdagangan baru. Setelah menjadi anggota World Trade Organization (WTO) pada 1995, Indonesia menjalin lebih dari 20 perjanjian perdagangan internasional, baik dalam kerangka kerja sama bilateral maupun regional sebagai salah satu negara ASEAN. Bentuk kerja sama perdagangan yang dijalin bervariasi dari *Preferential Tariff Agreement* (PTA) yang memuat kesepakatan penurunan tarif barang, *Free Trade Agreement* (FTA) mencakup barang, jasa dan investasi, hingga *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) yang memiliki cakupan lebih kompleks.

Indonesia terus memperluas kerja sama ke negara nontradisional serta aktif terlibat dalam penyusunan tatanan baru dunia di bidang investasi dan *electronic commerce*. Selama 2021, Indonesia melanjutkan perundingan perjanjian perdagangan bilateral dengan beberapa negara mitra, antara lain European Union (EU), melakukan perundingan bidang jasa dan investasi dengan Chili (yang pada 2019 telah dijalin kerja sama perdagangan barang), serta mulai melakukan perundingan dengan Uni Emirat Arab (UEA). Di level regional, Indonesia juga terus mempererat integrasi jasa keuangan dan *e-commerce* dengan negara ASEAN serta ikut membangun kerja sama strategis dengan

negara mitra ASEAN melalui proses *general review ASEAN-Australia New Zealand FTA*. Indonesia turut menyusun tatanan baru dunia di bidang investasi dan *e-commerce* melalui keterlibatan aktif dalam inisiatif plurilateral yang berlangsung di WTO, yaitu *Joint Statement Initiative on Investment Facilitation for Development* (JSI-IFD) dan *Joint Statement Initiative on Electronic Commerce* (JSI *e-commerce*).

Jalanan kerja sama perdagangan internasional berpotensi mendorong ekspor RI melalui penurunan tarif bea masuk dan kerja sama pengembangan kapasitas. Dari berbagai kerja sama yang dijalin, RI memperoleh beberapa manfaat antara lain berupa eliminasi tarif bea masuk yang diberikan negara mitra sejak perjanjian berlaku efektif dan atau secara bertahap. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk-produk asal RI karena harganya yang relatif lebih murah dibandingkan produk sejenis dari negara yang tidak menjalin kerja sama perdagangan internasional dengan negara mitra. Sebagai ilustrasi, saat ini RI mendapat keringanan bea masuk 0% ke pasar Australia dan New Zealand dari perjanjian *ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA) dan tambahan keringanan bea masuk yang signifikan dari Korea, Jepang, dan Tiongkok dari kerja sama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).

Gambar 2.1 Kerja sama Perdagangan Internasional Indonesia



Sumber: Ditjen PPI Kemendag, November 2021

Beberapa perjanjian perdagangan memuat pengaturan tentang kerja sama yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau standar produksi. Pada kerja sama bilateral dengan Australia terdapat pengaturan pengembangan kapasitas UKM dalam bentuk *workshop*, *training* pengembangan produk dan kapasitas ekspor yang sesuai standar Australia, serta beragam program *engagement* dengan pelaku usaha Australia. Hal serupa juga terdapat pada kerja sama yang dijalin dengan European Free Trade Association (EFTA) dimana terdapat pengaturan mengenai kerja sama peningkatan kapasitas UKM dalam hal keamanan dan mutu barang untuk mencapai kesesuaian dengan standar, regulasi teknis dan persyaratan pasar di negara-negara EFTA (Swiss, Norwegia, Liechtenstein, Islandia).

Bank Indonesia mendukung seluruh tahapan kerja sama perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan derajat integrasi ekonomi Indonesia dengan perekonomian global dan daya saing dibanding negara *peers*. Pada tahap pranegosiasi, BI ikut terlibat dalam penyusunan asesmen potensi kerja sama negara calon mitra dan pemetaan derajat *compliance* RI dengan disiplin pengaturan domestik sektor jasa yang saat ini sedang dibahas secara plurilateral oleh beberapa negara WTO dalam *Joint Initiative on Services Domestic Regulation* (JI-SDR). Pada tahap negosiasi, BI ikut serta dalam proses perumusan posisi dan perundingan isu-isu yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan BI, diantaranya isu jasa keuangan/*investasi/e-commerce/economic cooperation*. Setelah proses negosiasi, BI dalam penyusunan dokumen ratifikasi beberapa perjanjian yang memuat isu jasa keuangan, memfasilitasi diseminasi manfaat kerja sama perdagangan internasional (bersama *FTA Center* Kemendag), dan ikut serta menyusun rencana kerja yang terkait dengan implementasi perjanjian.

Bank Indonesia juga terus menjaga ruang kebijakan serta pangsa pasar pelaku usaha domestik. Secara umum, Bank Indonesia selalu menjaga agar disiplin yang disepakati dalam seluruh perjanjian perdagangan internasional tidak membatasi ruang kebijakan BI dalam menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran, serta menjaga kemampuan penerapan *safeguard measures* (antara lain kebijakan *safeguard* saat terjadi krisis *Balance of Payment*). BI juga berupaya menjaga pangsa pasar pelaku usaha domestik dengan hanya memberikan komitmen akses

pasar yang sejalan dengan komitmen terdahulu yang telah diberikan di WTO dan hanya melakukan negosiasi pembukaan akses pasar lanjutan secara selektif dengan memperhatikan kesiapan peraturan/pelaku usaha/pasar domestik serta berbasis prinsip resiprositas.

II.2.2. Promosi Perdagangan dan Investasi

Linkage IRU-RIRU-GIRU sampai dengan pertengahan Desember 2021, telah memfasilitasi penyelenggaraan 126 kegiatan promosi perdagangan dan investasi pada sektor-sektor produktif dan pariwisata, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk rangkaian kegiatan edukasi/diseminasi potensi investasi/pasar luar negeri. BI telah memfasilitasi penyelenggaraan 37 kegiatan promosi perdagangan di luar negeri yang diikuti 364 UMKM binaan BI untuk mempromosikan produk kopi, *fashion*, makanan olahan, *home decor*, perikanan, dan perhiasan. BI juga memfasilitasi 30 kegiatan promosi investasi untuk mempromosikan 105 proyek yang didominasi sektor pariwisata (21%), kawasan industri (16%), dan infrastruktur (16%). Pertemuan bilateral juga dilakukan untuk merespons minat pasar Luar negeri pada sektor baru. BI memfasilitasi pertemuan bilateral antara investor potensial Tiongkok yang tertarik dengan proyek kawasan industri halal sejalan dengan minat pengembangan industri halal yang makin tinggi. Kegiatan promosi perdagangan dan investasi juga merupakan rangkaian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja.

Fasilitasi promosi dilengkapi dengan *pre-event webinar* edukasi untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan promosi. *Linkage IRU-RIRU-GIRU* telah memfasilitasi 19 kegiatan edukasi di bidang perdagangan untuk meningkatkan pemahaman UMKM binaan BI mengenai peluang pasar ekspor ke luar negeri antara lain Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Jepang, Singapura, dan Taiwan. Selain itu, tujuh kegiatan edukasi di bidang investasi juga telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman RIRU mengenai proyek investasi yang *clean and clear*. Upaya memperluas jangkauan informasi dilakukan melalui sinergi pada *platform digital* yang tengah dikembangkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Langkah tersebut berperan sebagai media untuk mempromosikan potensi investasi dan perdagangan agar tetap dapat dijangkau oleh calon investor maupun *buyer/agregator* di luar negeri.

Strategi promosi investasi dan perdagangan berfokus pada sinergi, targeted dan outcome oriented. Untuk meningkatkan pemahaman investor dan/atau *buyer* potensial di luar negeri mengenai proyek dan/atau produk UMKM Indonesia, sinergi di level IRU, RIRU, dan GIRU juga melibatkan K/L, perwakilan otoritas di luar negeri, serta mitra/*stakeholder* eksternal lain. Beberapa mitra/*stakeholder* eksternal yang dilibatkan pada penyelenggaraan kegiatan promosi, yaitu a.l. Singapore Business Federation, ASEAN-Japan Center, Coffee Association of Guangzhou, *aggregator* dan diaspora di luar negeri. Dukungan diaspora antara lain diberikan dalam bentuk transfer *knowledge* mengenai strategi yang harus dilakukan UMKM untuk menembus pasar luar negeri. Diaspora juga mampu mengatasi kendala bahasa bagi UMKM, terutama pada kegiatan edukasi, seperti terlihat dari antusiasme interaksi UMKM dengan narasumber.

Promosi investasi dan perdagangan dilakukan secara targeted, baik dari sisi jenis investasi/produk ekspor yang dipromosikan maupun negara tujuan promosi.

Pendekatan ini sangat bermanfaat agar promosi sejalan dengan pemetaan *demand* dan *supply*. Pendekatan yang lebih *targeted* tercermin pada perluasan akses ke beberapa wilayah baru, seperti Australia, Perancis dan Uni Emirat Arab. Proyek Investasi dan produk yang diikuti sertakan pada kegiatan promosi investasi dan perdagangan telah melalui proses seleksi, kurasi, dan minat oleh calon investor/*buyer*.

Kegiatan promosi diharapkan dapat menghasilkan komitmen dari pembeli dan investor. Sejumlah komitmen investasi telah berhasil diperoleh, antara lain: (i) penandatanganan MoU proyek pengembangan Marina Yacht Pulau Klah Sabang; (ii) pertemuan atau komunikasi lanjutan antara investor Inggris dengan pengelola beberapa proyek sebagai tindak lanjut *Indonesia Investment Forum 2021* di London. Promosi perdagangan juga menghasilkan (i) penandatanganan

MoU sebagai tindak lanjut *In-Store Promotion* UMKM Gayeng Singapura; (ii) pengiriman produk kopi Toraja *Mountain Coffee* dari *event Coffee Business Matching* di Tokyo; (iii) perpanjangan kerja sama *in-store promotion* di *Dept. Store* Jepang pada 2022.

Keberhasilan kegiatan promosi didukung oleh inovasi proses bisnis pada kegiatan promosi investasi dan perdagangan.

Inovasi untuk mengoptimalkan kegiatan promosi perdagangan dilakukan dengan mengikutsertakan UMKM produk kopi pada *buying mission* dengan metode kurasi tiga tahap. Keikutsertaan ini diharapkan dapat menghasilkan standar *best practice* bagi proses kurasi untuk produk kopi, sehingga perencanaan promosi produk kopi menjadi lebih baik dengan hasil yang lebih optimal. Inovasi kegiatan promosi juga diarahkan untuk mendorong transaksi penjualan seperti *in-store promotion* di Pusat Perbelanjaan yang strategis serta *showcasing* produk UMKM pada lokasi premium dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan pameran.

Inovasi lain yang dilakukan adalah promosi perdagangan produk kopi melalui partisipasi dalam lelang kopi seperti Singapore Coffee Auction.

Model promosi via *auction* dapat memotivasi calon pembeli melakukan penawaran beberapa kali sehingga dapat meningkatkan harga. Inovasi melalui *showcasing* produk UMKM kepada *aggregator* ekspor membuka peluang *showcasing* pada *spot-spot* premium. Langkah tersebut juga disertai pendampingan untuk menyiapkan produk UMKM agar memenuhi standar pasar luar negeri. Dari sisi promosi investasi, inovasi dilakukan dengan penguatan proses pemilihan proyek yang *targeted* untuk merespons minat dari investor melalui *Road to Indonesia Investment Day Abu Dhabi 2021*. Dalam kesempatan ini dihadirkan profil lima proyek investasi prospektif dalam bidang pariwisata, kesehatan, industri, dan infrastruktur.

Bank Indonesia terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kebankentralan. Selama 2021, BI mempersiapkan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, seperti persiapan substansi dan *event arrangement finance track* Presidensi G20 Indonesia, serta menjadi *chair Asian Consultative Council – Bank for International Settlements (ACC-BIS)*. Presidensi G20 Indonesia yang bertemakan “*Recover Together, Recover Stronger*” akan fokus pada upaya mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi, serta memastikan pertumbuhan yang keberlanjutan dan inklusif. BI bersama K/L telah menetapkan enam agenda prioritas pada jalur keuangan (*finance track*), yaitu: (i) *Exit strategy to support recovery*, (ii) *Addressing scarring effect to secure future growth*, (iii) *Payment systems in the digital era*, (iv) *Sustainable finance*, (v) *Digital financial inclusion*, serta (vi) *International taxation* (Boks Presidensi G20 Indonesia: Memimpin Pemulihan Global yang Merata dan Kuat).

Eksistensi pada fora internasional ditandai dengan keketuaan ACC-BIS. Gubernur BI menjadi Ketua ACC-BIS mulai 26 September 2021 hingga dua tahun mendatang. BI akan mengarahkan aktivitas ACC-BIS yang berfokus pada riset dan rekomendasi kebijakan di sejumlah isu yang sedang mengemuka, antara lain “*Well Calibrated, Well Planned, and Well Communicated Exit Strategy to Ensure Smooth Recovery; CBDC and Cross Border Payment, Climate Change and Sustainable Finance*.” Keketuaan Gubernur BI di ACC-BIS juga akan dapat mendukung agenda Indonesia pada Presidensi G20 2022 dan Keketuaan ASEAN 2023 yang akan datang.

Implementasi peningkatan kapasitas melalui kerja sama area kebankentralan atau *Structured Bilateral Cooperation (SBC)* pada masa pandemi COVID-19 tetap berjalan dengan baik.¹³ Sepanjang 2021 telah dilaksanakan beberapa kegiatan SBC, yaitu:

- 1. SBC dengan Bank of Japan.** Telah dilaksanakan *virtual technical discussion (TD)* mengenai “Pengembangan dan Pengawasan BI-RTGS”, yang membahas tantangan dan kebijakan pengawasan RTGS. Selain itu, *High Level Meeting (HLM)* antara Gubernur BI dan BOJ juga telah diselenggarakan dengan membahas perkembangan ekonomi negara masing-masing dan strategi pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah bersama bank sentral dalam mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, serta mendiskusikan topik dan agenda Presidensi G20 Indonesia.
- 2. SBC dengan Bank of England.** Telah dilaksanakan *Regional Workshop “Enhancing Payment Systems for the Digital Age and the Role of Fintech”* untuk mendiskusikan modernisasi RTGS dan digitalisasi sistem pembayaran, serta CBDC. Sebelumnya, juga telah diselenggarakan *ASEAN regional seminar on Managing Risks from Climate Change* secara *virtual* guna membahas dampak *climate change* bagi perekonomian serta respon kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan bank sentral dalam menciptakan ekonomi hijau.
- 3. SBC dengan Bank of Korea (BOK).** Telah diselenggarakan diskusi teknis mengenai *Artificial Intelligence and Analytic* yang membahas isu dan perkembangan penerapan AI pada kedua bank sentral. Kegiatan ini diharapkan mendukung penguatan proyek *omnidata intelligence* di BI. Selain itu juga dilakukan diskusi teknis mengenai *Open Market Operation* yang mengulas strategi dan kebijakan bank sentral dalam memperkuat kerangka operasi moneter.

¹³ **Structured Bilateral Cooperation (SBC)** merupakan kerja sama bilateral di area kebankentralan yang dilakukan oleh BI dengan bank sentral mitra, dalam kerangka terstruktur, sistematis, dan komprehensif.

4. SBC dengan Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT). Telah diselenggarakan diskusi teknis mengenai *Development of Estimation Model for Currency Demand in the CBRT* untuk membahas praktik terbaik di internasional mengenai pengelolaan uang kartal oleh bank sentral. Informasi tersebut menjadi masukan bagi BI dalam penguatan kebijakan pengelolaan uang di era digital. Selain itu juga diselenggarakan diskusi teknis mengenai “*Experiences on Implementing Handbook Securities Statistics with a focus on Debt Securities Statistics*,” yang memberikan *insight* dalam mengimplementasikan komitmen Indonesia pada fora G20, khususnya terkait “*G20 Recommendations of DGI.II-7 Securities Statistics*.”

BI juga bekerja sama dengan SEACEN untuk melaksanakan pengembangan kapasitas SDM bank sentral di kawasan. SEACEN merupakan lembaga penyedia program *capacity building* dan riset area kebanksentralan. Program SEACEN mencakup area moneter, stabilitas keuangan dan pengawasan, sistem pembayaran dan setelmen, serta *leadership and governance*. Selama 2021, BI menyelenggarakan kursus internasional yakni: (i) *SEACEN Course: Data Analytics for Macroeconomic Surveillance*; (ii) *International Macroeconomic Analysis in a Post-COVID-19 World*; dan (iii) *Financial Stability and Macroprudential Supervision*.